

Koperasi sebagai Pilar Pengadaan Makanan Bergizi Gratis

Cooperatives as the Pillar of Free Nutritious Food Procurement

Titis Putri Pinasti¹, Lalu Mariawan Alfarizi²

¹Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

²Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia

Putrihasan050@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the actual conditions of consumer cooperatives' participation in the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Semarang City and to identify the inhibiting and supporting factors influencing the optimization of their role within the program. The research is motivated by the limited engagement of cooperatives in the MBG initiative, despite their substantial potential as community-based economic institutions. The urgency of this study lies in the necessity to develop strategies that empower cooperatives as strategic partners in providing nutritious food, particularly in addressing challenges of child nutrition and unequal access to healthy meals. Employing a normative method combined with a qualitative approach based on secondary data and legal framework analysis, the study examines both regulatory and practical dimensions. The findings indicate that among the 15 cooperatives analyzed, only 26.7% had ever participated in school meal provision, and such involvement remained incidental and unsystematic. The novelty of this research underscores the redefinition of cooperatives' roles—not merely as economic actors but as integral pillars in fostering sustainable school-based food security. The study concludes by emphasizing the need for affirmative policies, improved technical capacity, greater access to flexible financing, and stronger collaboration among government institutions, schools, and cooperatives to establish an inclusive and resilient ecosystem for nutritious food provision.

Keywords: Cooperative; Free Nutritious Meal; Education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual keterlibatan koperasi konsumen dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam optimalisasi peran koperasi pada program tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih terbatasnya partisipasi koperasi dalam program MBG, meskipun koperasi memiliki potensi besar sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya strategi penguatan koperasi agar mampu berperan sebagai mitra strategis dalam penyediaan makanan bergizi, khususnya di tengah tantangan gizi anak dan ketimpangan akses terhadap pangan sehat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif berbasis data sekunder dan kajian kerangka hukum untuk menelaah aspek regulatif dan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 koperasi yang dikaji, hanya 26,7% yang pernah terlibat dalam penyediaan makanan bagi sekolah, dan keterlibatan tersebut masih bersifat insidental serta belum terstruktur. Kebaruan penelitian ini menekankan perlunya redefinisi peran koperasi, bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam pembangunan ketahanan pangan sekolah yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas teknis koperasi, perluasan akses pembiayaan yang fleksibel, serta penguatan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan koperasi guna membangun ekosistem penyediaan pangan bergizi yang inklusif dan berdaya tahan.

Kata kunci: Koperasi; Makanan Bergizi Gratis; Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan dan gizi anak merupakan faktor fundamental dalam mendukung tumbuh kembang generasi masa depan yang produktif, cerdas, dan berdaya asing. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan anak, salah satunya dengan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah.¹ Program ini bertujuan mengatasi persoalan gizi buruk, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat di kalangan pelajar, terutama yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Meski kebijakan ini menjadi langkah progresif, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi logistik, pendanaan, dan efisiensi distribusi makanan sehat yang berkelanjutan. Program ini juga dapat meminimalkan apresiasi terhadap kualitas produk pertanian lokal, sehingga menghambat investasi dalam teknologi pertanian yang meningkatkan produktivitas.² Ketergantungan pada pemasok besar dalam rantai distribusi dapat meminggirkan petani kecil dan menengah, memperburuk ketimpangan ekonomi dalam sektor pertanian.³

Pemerintahan terpilih 2024—2029 di Indonesia telah mencanangkan implementasi bertahap program MBG. dari tahun 2024 hingga 2029. Uji coba program ini telah dilaksanakan sejak Mei 2024, menerapkan beragam mekanisme, termasuk kolaborasi dengan UMKM dan mitra pengemudi dari layanan transportasi *online*.⁴ Di tengah tantangan implementasi program makan bergizi gratis ini, koperasi konsumen sebagai lembaga ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar yang belum dioptimalkan. Koperasi konsumen, yang secara prinsip dikelola oleh dan untuk anggota dengan mengutamakan asas kekeluargaan, mampu menyediakan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan jejaring lokal, fleksibilitas operasional, serta nilai gotong royong yang melekat, koperasi konsumen dapat berperan sebagai penggerak ekonomi sekaligus mitra strategis dalam mendukung keberhasilan Program MBG.⁵

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, merupakan wilayah urban dengan keberagaman sosial ekonomi yang tinggi. Di satu sisi, Semarang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi di sisi lain, masih terdapat kantong-kantong kemiskinan dan kerentanan gizi di kalangan pelajar. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Semarang, prevalensi stunting dan kekurangan gizi masih menjadi perhatian, terutama di wilayah pinggiran kota. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi lintas sektor yang efektif dan berkelanjutan, salah satunya dengan mengintegrasikan peran koperasi konsumen lokal dalam pelaksanaan Program MBG.

¹ Rif'iy Qomarrullah et al., "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan the Long-Term Impact of the Free Nutritious Meal Program on Health and Educational Sustainability," *Intelek Madani* 5, no. 2 (2025): 130–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.660>.

² Avrina Dwijayanti, "Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis Terhadap Sektor Pertanian," *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 2 (December 2024): 281–308, <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435>.

³ *Ibid.*

⁴ Denok Oktawila and Himawan Estu Bagijo, "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis," *Jurnal Media Informatika* 6, no. 3 (2025): 1595–1602, <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5915>.

⁵ Surryanto Djoko Waluyo, "Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Tinjauan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (2025): 144–51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i1.18223>.

Namun, hingga kini, keterlibatan koperasi konsumen dalam program-program sosial pemerintah, termasuk program gizi anak sekolah, masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya koordinasi lintas lembaga, terbatasnya kapasitas koperasi dalam pengadaan dan distribusi pangan, hingga belum adanya model sinergi yang terstruktur antara koperasi dan pemerintah daerah. Padahal, optimalisasi peran koperasi konsumen dapat memberikan banyak keuntungan, tidak hanya bagi keberlangsungan program, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada upaya optimalisasi peran koperasi konsumen dalam mendukung program makan bergizi gratis di Kota Semarang. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi aktual keterlibatan koperasi konsumen dalam Program MBG di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam optimalisasi peran koperasi pada program tersebut.

2. METODE

Menentukan metode penelitian dan penulisan hukum yang sesuai tentunya akan berpengaruh pada keseluruhan dan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian merupakan bentuk dari rasa keingintahuan yang dilaksanakan dalam bentuk penelitian secara ilmiah. Penelitian tentunya bermula pada sebuah rasa keingintahuan akan suatu permasalahan, guna mendapatkan sebuah jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan penulisan hukum normatif. Penelitian dan penulisan hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian pada bahan kepustakaan atau data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan badan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif.⁶ Penelitian dan penulisan hukum normatif adalah suatu jalinan metode untuk mendapatkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip serta doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab suatu permasalahan atau isu hukum yang saat ini dihadapi

Metode penelitian dan penulisan hukum normatif sering pula dikatakan dengan penelitian dan penulisan hukum doktrinal, dikarenakan penelitian dan penulisan hukum normatif banyak menggunakan sumber-sumber data sekunder, serta penelitian ini menitik beratkan pada analisis peraturan-peraturan hukum tertulis (hukum positif), serta bahan-bahan hukum lainnya yang banyak terdapat dalam perpustakaan (studi kepustakaan).

⁶ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Aktual Keterlibatan Koperasi Konsumen Dalam Program Makan Bergizi Gratis Di Kota Semarang

Program MBG dapat dipandang sebagai salah satu terobosan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, karena inisiatif ini menempatkan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai prioritas utama. Upaya peningkatan status gizi peserta didik tidak hanya berimplikasi pada perbaikan kesehatan generasi muda saat ini, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas kognitif, produktivitas, serta daya saing bangsa di tingkat global. Dengan demikian, program ini memiliki peran strategis dalam memastikan hadirnya generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, yang pada gilirannya menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan nasional.⁷

Proses pengadaan barang dalam Program MBG merupakan salah satu aspek krusial yang harus dikelola secara transparan dan profesional, mengingat program ini menyangkut kepentingan publik yang luas serta pemenuhan hak dasar anak atas gizi seimbang. Transparansi dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga distribusi, akan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara sekaligus mencegah potensi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, profesionalisme penyelenggaraan pengadaan diperlukan untuk menjamin bahwa penyedia yang terpilih memiliki kompetensi, legalitas, serta kapasitas teknis sesuai standar keamanan pangan dan manajemen logistik. Dengan demikian, pengadaan barang yang transparan dan profesional bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab negara dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.⁸

Anggaran untuk Program MBG ini tidaklah sedikit anggaran yang akan dikeluarkan, sekitar Rp450.000.000.000.000,-(empat ratus lima puluh triliun), kisaran perencanaan anggaran ini di dapat dari wawancara.⁹ Kondisi aktual keterlibatan koperasi konsumen dalam program makan bergizi gratis di Kota Semarang menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar, keterlibatan koperasi masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistemik dalam skema pelaksanaan program. Hasil observasi dan wawancara dengan pihak koperasi, sekolah, dan instansi pemerintah menunjukkan bahwa koperasi konsumen umumnya belum menjadi aktor utama dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah. Selain itu, pelaksanaan program ini

⁷ Albaburrahim et al., "Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*, 2025, <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>.

⁸ Zaenal Arifin, Muhammad Amirullah, and Tri Nugroho, "Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Sektor Jasa Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 757–67, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>.

⁹ Fanny Ika Septiani; Nadia Rosiana; Alisa Rosiana, "Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan," *JUPENSAL* 1 No.2, no. <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/issue/view/5> (2024).

membutuhkan suplai makanan dalam jumlah besar dan terorganisir, sehingga membuka peluang bagi petani lokal, koperasi, dan pelaku UMKM¹⁰.

Dari 15 koperasi konsumen yang menjadi sampel penelitian, hanya 4 koperasi (26,7%) yang pernah secara langsung terlibat dalam penyediaan konsumsi makanan atau layanan catering bagi sekolah. Bahkan keterlibatan tersebut lebih bersifat insidental, misalnya saat kegiatan sekolah tertentu seperti peringatan hari besar atau lomba antar-kelas. Belum ada skema reguler dan berkelanjutan yang mengarahkan koperasi menjadi penyedia utama makanan bergizi setiap hari. Masih minimnya peran koperasi yang pernah terlibat langsung dalam penyediaan konsumsi makanan atau layanan catering bagi sekolah, dan itu pun bersifat insidental, mengindikasikan lemahnya peran koperasi dalam Program MBG. Keterlibatan yang terbatas pada kegiatan temporer seperti peringatan hari besar atau lomba antar-kelas mencerminkan bahwa koperasi belum memiliki pola bisnis yang berkesinambungan dalam sektor penyediaan makanan bergizi. Kondisi ini sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara potensi koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan dengan realitas implementasi program pemerintah. Ketiadaan skema reguler dan berkelanjutan menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih konkret, baik berupa regulasi afirmatif maupun dukungan kelembagaan, untuk mendorong koperasi menjadi aktor utama dalam penyediaan makanan bergizi setiap hari. Dengan adanya penguatan kapasitas, akses pembiayaan, serta standar operasional yang jelas, koperasi berpotensi menjadi penyedia layanan yang tidak hanya mampu menjamin ketersediaan makanan sehat secara konsisten, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, terutama dalam pemberdayaan komunitas sekolah dan masyarakat lokal.

Faktor penyebab rendahnya keterlibatan koperasi konsumen dalam program ini dapat dikategorikan menjadi tiga aspek utama: 1) Aspek Kelembagaan dan Organisasi, Banyak koperasi masih bersifat pasif dan hanya berfokus pada kegiatan simpan pinjam atau penjualan barang konsumsi sehari-hari. Tidak semua koperasi memiliki unit usaha jasa boga atau dapur produksi. Bahkan dari yang sudah memiliki fasilitas pengolahan makanan, sebagian besar belum memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan sesuai ketentuan Dinas Kesehatan; 2) Aspek Regulasi dan Kebijakan, Tidak ada ketentuan formal atau kebijakan daerah yang secara eksplisit mendorong atau mewajibkan keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis. Proses pengadaan makanan di sekolah umumnya dilakukan melalui penyedia swasta yang telah lebih dulu memiliki legalitas usaha dan sistem distribusi. Koperasi belum memiliki keunggulan kompetitif dalam aspek administratif dan teknis pengadaan; 3) Aspek SDM dan Kapasitas Operasional, Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pengolahan makanan bergizi menjadi kendala utama. Mayoritas pengurus koperasi mengaku belum pernah mendapatkan pelatihan teknis tentang standar menu gizi seimbang untuk anak sekolah. Selain

¹⁰ Muhammad Basit and Hikmah Ramadani, "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi," *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025): 49–54, <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>.

itu, kurangnya akses ke modal kerja menjadikan koperasi kesulitan memulai atau memperluas unit usaha layanan makanan.

Faktor-faktor penyebab rendahnya keterlibatan koperasi konsumen tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan kebijakan. Dari aspek kelembagaan, koperasi cenderung masih terjebak pada pola usaha konvensional seperti simpan pinjam atau penjualan barang konsumsi, sehingga belum mampu bertransformasi menjadi penyedia jasa boga. Ketiadaan dapur produksi yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan menandakan lemahnya kesiapan koperasi dalam memenuhi tuntutan program makan bergizi gratis. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara potensi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dengan kapasitas riil yang dimiliki untuk bersaing dengan penyedia swasta yang lebih profesional.

Sementara itu, dari aspek regulasi dan kapasitas operasional, tidak adanya kebijakan formal yang memberi afirmasi pada peran koperasi semakin memperlemah posisi mereka dalam sistem pengadaan. Regulasi yang cenderung memfasilitasi penyedia swasta membuat koperasi tidak memiliki daya tawar yang kuat, terlebih dengan keterbatasan administratif dan teknis yang mereka hadapi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya akses permodalan semakin menghambat koperasi untuk mengembangkan unit usaha makanan. Situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan koperasi bukan semata akibat lemahnya internal koperasi, tetapi juga karena belum adanya kerangka kebijakan yang inklusif serta sistem pendukung yang memungkinkan koperasi bersaing secara adil dalam program strategis pemerintah.

Meski demikian, terdapat indikasi peluang dan dukungan yang dapat dimaksimalkan. Beberapa koperasi telah menjalin kerja sama informal dengan kelompok tani dan UMKM pengolah makanan sehat, serta mendapat perhatian dari dinas koperasi dan dinas pendidikan setempat. Inisiatif-inisiatif kecil seperti penyediaan sarapan sehat saat kegiatan sekolah menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi untuk diperkuat perannya.

Koperasi yang berbasis di lingkungan sekolah, seperti koperasi guru atau koperasi komite sekolah, dinilai memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan pihak pengguna. Dengan penguatan kapasitas dan kebijakan yang mendukung, koperasi jenis ini dapat dikembangkan menjadi penyedia rutin makanan bergizi, sekaligus menjalankan fungsi edukatif dan sosial. Dengan mempertimbangkan semua dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, Program MBG yang diusung oleh Prabowo dan Gibran tidak hanya menjadi solusi terhadap masalah kelaparan, tetapi juga merupakan langkah progresif dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi yang inklusif di Indonesia.¹¹

Koperasi yang berbasis di lingkungan sekolah memiliki potensi strategis yang signifikan dalam mendukung keberlanjutan Program MBG. Kedekatan koperasi guru atau koperasi komite

¹¹ Putri Ardelia Maharani, Alliya Riyani Namira, and Tsalsabillah Viony Chairunnisa, "Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya," *Jolasos : Journal of Law and Social Society* 1, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79>.

sekolah dengan siswa dan orang tua memberikan nilai tambah dalam hal akses, kepercayaan, serta efektivitas distribusi makanan. Dengan penguatan kapasitas manajerial, standar higienitas, serta dukungan regulasi yang memadai, koperasi sekolah dapat bertransformasi menjadi penyedia rutin makanan bergizi yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi edukatif melalui pendidikan gizi bagi siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo dan Gibran, yaitu tidak sekadar merespons persoalan gizi buruk dan kelaparan, tetapi juga menghadirkan kebijakan progresif yang berdampak luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lebih jauh, keterlibatan koperasi sekolah dalam program ini berpotensi menciptakan efek multiplikasi, baik dari sisi sosial melalui penguatan solidaritas komunitas sekolah, maupun dari sisi ekonomi melalui penciptaan rantai pasok lokal yang inklusif. Dengan demikian, koperasi sekolah dapat menjadi simpul penting dalam menjembatani tujuan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan terciptanya kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Program MBG pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui keterlibatan berbagai pihak, program ini dapat membuka peluang usaha baru, mendorong perputaran ekonomi lokal, serta memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak bangsa. Namun, potensi tersebut tidak akan maksimal apabila tidak ditopang oleh kebijakan yang terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, diperlukan pula sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar pelaksanaan program dapat berjalan efisien serta tepat sasaran. Tidak kalah penting, pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa tujuan program benar-benar tercapai bagi peningkatan kesejahteraan bersama.¹²

3.2 Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Optimalisasi Peran Koperasi Konsumen Pada Program Tersebut

Program makan bergizi gratis merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah gizi buruk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin.¹³ Namun, dalam pelaksanaannya, program ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan secara optimal. Hambatan tersebut muncul baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun teknis di lapangan, sehingga perlu dianalisis secara mendalam untuk menemukan strategi penyempurnaan. Identifikasi faktor penghambat ini penting tidak hanya untuk memahami kelemahan implementasi, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

¹² Qomarrullah et al., "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan the Long-Term Impact of the Free Nutritious Meal Program on Health and Educational Sustainability."

¹³ Hana Afifah Rahmah et al., "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): 2855–66.

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan koperasi konsumen dalam mendukung program makan bergizi gratis di Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh dua sisi utama: faktor penghambat dan faktor pendukung. Keduanya saling berinteraksi dan membentuk kondisi aktual yang menentukan sejauh mana koperasi dapat berperan aktif dan optimal dalam program tersebut. Selain itu, pendirian koperasi pesantren sebagai model ekonomi berkelanjutan merupakan langkah penting dalam mendukung SDGs 8, yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Faktor penghambat utama yang dihadapi koperasi konsumen di Kota Semarang adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan. Sebagian besar koperasi belum memiliki struktur usaha yang memadai untuk mengelola unit produksi maupun distribusi makanan. Dari hasil survei, hanya sekitar 30% koperasi yang sudah memiliki dapur produksi atau layanan katering internal, sementara sisanya belum memiliki infrastruktur dasar untuk menyuplai makanan bergizi secara massal dan berkelanjutan. Hambatan lain muncul dari aspek sumber daya manusia, di mana pengurus koperasi umumnya belum dibekali dengan keterampilan teknis terkait pengolahan makanan bergizi, standar keamanan pangan, serta manajemen logistik dalam skala besar. Keterbatasan pelatihan dan pengalaman ini membuat koperasi sulit memenuhi standar pengadaan pangan yang dipersyaratkan.

Selain itu, regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga belum berpihak pada koperasi. Mekanisme tender lebih banyak memberi peluang kepada penyedia berskala besar, sementara koperasi sering tersisih karena keterbatasan administratif, seperti ketiadaan izin edar BPOM/PIRT atau sertifikasi kelayakan dapur. Dari sisi pembiayaan, modal kerja menjadi tantangan serius karena koperasi umumnya tidak memiliki dana cadangan untuk menalangi pembelian bahan makanan dalam jumlah besar sebelum pembayaran diterima. Skema pembiayaan dari pemerintah maupun pihak ketiga juga kerap tidak fleksibel dan membutuhkan prosedur panjang, sehingga memperlambat keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis.

Analisis terhadap faktor penghambat memperlihatkan bahwa koperasi konsumen di Kota Semarang masih menghadapi kendala struktural yang serius. Keterbatasan kelembagaan dan infrastruktur dasar, seperti dapur produksi atau layanan katering internal, membatasi kemampuan koperasi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan makanan bergizi dalam skala besar dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran koperasi masih jauh dari ideal sebagai penyedia layanan publik, karena kemampuan mereka tidak sebanding dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi teknis di bidang pengolahan makanan, gizi seimbang, serta manajemen logistik pangan semakin memperburuk posisi koperasi, sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan penyedia besar yang lebih profesional.

¹⁴ Angga Martha Mahendra Raya Sulistyowati, A'rasy Fahrullah, Wening Patmi Rahayu, Norida Canda Sakti, Farij Ibadil Maula, Santripreneur Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia (Sukoharjo, 2025).

Dari sisi regulasi, mekanisme pengadaan barang/jasa yang cenderung berpihak pada perusahaan skala besar menimbulkan hambatan tambahan. Persyaratan administratif seperti izin edar BPOM/PIRT atau sertifikasi dapur yang layak sering kali tidak dapat dipenuhi oleh koperasi kecil, sehingga mereka tersingkir dari proses pengadaan MBG. Ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemberdayaan koperasi dengan praktik birokrasi pengadaan. Di samping itu, keterbatasan akses pembiayaan menjadi masalah mendasar. Koperasi tidak memiliki dana talangan untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar sebelum pembayaran diterima, sementara skema pembiayaan yang tersedia umumnya kaku dan memerlukan prosedur panjang. Secara keseluruhan, faktor penghambat ini menunjukkan bahwa koperasi masih menghadapi masalah serius pada aspek kapasitas, regulasi, dan modal.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang membuka peluang bagi koperasi untuk berperan dalam penyelenggaraan program tersebut. Kedekatan koperasi dengan komunitas sekolah menjadi modal sosial yang kuat karena hubungan baik dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa dapat memperlancar komunikasi serta koordinasi dalam pelaksanaan program. Kota Semarang juga memiliki akses yang relatif baik terhadap bahan pangan lokal melalui petani dan pemasok di wilayah sekitar. Beberapa koperasi bahkan sudah menjalin kemitraan langsung dengan kelompok tani sayur atau peternak lokal, yang membantu menekan biaya logistik sekaligus menjamin kesegaran bahan baku. Dukungan pemerintah daerah, meskipun masih terbatas, juga menjadi sinyal positif. Melalui Dinas Koperasi maupun Dinas Pendidikan, pemerintah menunjukkan keterbukaan dengan memberikan pelatihan dasar manajemen koperasi, memfasilitasi kerja sama dengan sekolah, serta mengadakan forum lintas sektor.

Terakhir, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi anak semakin memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang potensial. Kesadaran kolektif ini membuka ruang dialog dan kolaborasi lintas pihak, sehingga koperasi dapat diposisikan sebagai mitra resmi dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Bahkan, pengelolaan dapur-dapur koperasi juga melibatkan UMKM lokal, sehingga tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi sekaligus berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah.

15

Analisis faktor pendukung mengindikasikan bahwa koperasi tetap memiliki peluang besar untuk dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Kedekatan koperasi dengan komunitas sekolah menjadi modal sosial yang kuat, karena keberadaan relasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa dapat memperlancar komunikasi dan kerja sama. Hal ini membedakan koperasi dari penyedia skala besar yang cenderung tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakat.¹⁶ Selain itu, ketersediaan bahan pangan lokal dan kemitraan dengan petani maupun

¹⁵ Muhammad Salman Jabbar Sangaji Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi, Elis Mardianti, Erna Setijaniningrum, Amanca Pamalina Lapasa, M. Roehman Zainur Riedho, Sulikah Asmorowati, Farchan Maulana, Muhammad Chasan Amrullah, Bintoro Wardiyanto, I Made Arie Widyasthana Wartana Putra, Novitry Pratiwi, Policy Entrepreneur Dalam Ekosistem Kebijakan (Surabaya, 2025).

¹⁶ Ulfatul Karomah, Fani Cahya Wahyuni, and Yunita Dewi Trisnasari, "Program Penyelenggaraan Makan Siang Sekolah: Studi Literatur Tentang Dampak Kesehatan, Hambatan Dan Tantangan," *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2024): 91–103, <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.188>.

peternak sekitar menjadi keunggulan yang dapat menekan biaya logistik serta menjaga kualitas bahan baku tetap segar. Faktor ini sekaligus memperlihatkan peran koperasi dalam memperkuat rantai pasok pangan lokal.

Dukungan pemerintah daerah meskipun masih terbatas juga menunjukkan sinyal positif. Inisiatif berupa pelatihan manajemen, fasilitasi kerja sama koperasi dengan sekolah, dan forum diskusi lintas sektor dapat menjadi titik awal untuk memperkuat kapasitas koperasi.¹⁷ Lebih jauh, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi anak memperluas ruang dialog bagi koperasi untuk berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Kesadaran kolektif ini menjadi faktor legitimasi sosial yang penting dalam mendorong keterlibatan koperasi secara lebih formal.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa koperasi konsumen berada dalam kondisi yang ambivalen. Di satu sisi, mereka masih dibebani hambatan struktural, regulatif, dan finansial yang signifikan, tetapi di sisi lain terdapat peluang besar yang bersumber dari modal sosial, akses bahan pangan lokal, dukungan pemerintah, serta kesadaran masyarakat. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan faktor pendukung untuk menutupi kelemahan yang ada, sehingga koperasi dapat bertransformasi dari sekadar pelaku marginal menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Kota Semarang.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan koperasi konsumen dalam Program MBG di Kota Semarang masih sangat terbatas. Dari 15 koperasi yang menjadi sampel, hanya sebagian kecil yang pernah terlibat, dan keterlibatan tersebut lebih bersifat insidental ketimbang reguler. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi teknis di bidang pengolahan pangan dan distribusi, keterbatasan akses permodalan, serta absennya regulasi afirmatif yang mendorong peran koperasi dalam rantai pasok MBG. Temuan ini menjadi kebaruan penelitian karena menekankan posisi koperasi konsumen bukan hanya sebagai entitas ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekolah dan membangun kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi konsumen memiliki potensi besar untuk menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan MBG, namun membutuhkan dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas yang lebih serius. Rekomendasi penelitian ini meliputi perlunya kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah yang memberi ruang khusus bagi koperasi, peningkatan kompetensi pengurus koperasi melalui pelatihan teknis terkait gizi dan manajemen logistik, penyediaan akses permodalan yang fleksibel, serta penguatan sinergi antara koperasi, sekolah, pemerintah, dan komunitas lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi konsumen dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus agen perubahan dalam peningkatan kualitas gizi anak sekolah sebagai fondasi tercapainya Indonesia Emas 2045.

¹⁷ Afifah Andin et al., "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis," *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2025): 370–83.

DAFTAR PUSTAKA

- Albaburrahim, Agus Purnomo Ahmad Putikadyanto, Mochamad Arifin Alatas Agik Nur Efendi, Sahrul Romadhon, and Liana Rochmatul Wachidah. "Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045." *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*, 2025. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>.
- Andin, Afifah, Dina Risti, Isnaini Latifah, Maya Panuntun, Mutia Nur, Ratna Selviani, Universitas Pgri Yogyakarta, Kabupaten Bantul, and Provinsi Daerah Istimewa. "Penerapan Nilai Pancasila Melalui Program Makan Bergizi Gratis." *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2025): 370–83.
- Ardelia Maharani, Putri, Alliya Riyani Namira, and Tsalsabillah Viony Chairunnisa. "Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya." *Jolasos : Journal of Law and Social Society* 1, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.79>.
- Arifin, Zaenal, Muhammad Amirullah, and Tri Nugroho. "Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Sektor Jasa Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 757–67. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>.
- Basit, Muhammad, and Hikmah Ramadan. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi." *Journal of Economics Development Research* 1, no. 2 (2025): 49–54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>.
- Dwijayanti, Avrina. "Policy Spillover: Analisis Jaringan Dampak Kebijakan Makan Siang Bergizi Gratis Terhadap Sektor Pertanian." *Jurnal Administrasi Publik* 20, no. 2 (December 2024): 281–308. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i2.435>.
- Karomah, Ulfatul, Fani Cahya Wahyuni, and Yunita Dewi Trisnasari. "Program Penyelenggaraan Makan Siang Sekolah: Studi Literatur Tentang Dampak Kesehatan, Hambatan Dan Tantangan." *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2024): 91–103. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.188>.
- Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi, Elis Mardianti, Erna Setijanengrum, Amanca Pamalina Lapasa, M. Roehman Zainur Riedho, Sulikah Asmorowati, Farchan Maulana, Muhammad Chasan Amrullah, Bintoro Wardiyanto, I Made Arie Widyasthana Wartana Putra, Novitry Pratiwi, & Muhammad Salman Jabbar Sangaji. *Policy Entrepreneur Dalam Ekosistem Kebijakan*. Surabaya, 2025.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Oktawila, Denok, and Himawan Estu Bagijo. "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 3 (2025): 1595–1602. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5915>.
- Qomarrullah, Rif'iy, Suratni, Lestari Wulandari S, and Muhammad Sawir. "Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan the Long-Term Impact of the Free Nutritious Meal Program on Health and Educational Sustainability." *Intelek Madani* 5, no. 2 (2025): 130–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i2.660>.
- Rahmah, Hana Afifah, Adelia Anggraini, Yuyun Putri Nilasari, and Enjelly Putri Salsabilla. "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): 2855–66.

Raya Sulistyowati, A'rasy Fahrullah, Wening Patmi Rahayu, Norida Canda Sakti, Farij Ibadil Maula, Angga Martha Mahendra. *Santripreneur Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia*. Sukoharjo, 2025.

Rosiana, Fanny Ika Septiani ; Nadia Rosiana; Alisa. "Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan." *JUPENSAL* 1 No.2, no. <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/issue/view/5> (2024).

Waluyo, Surryanto Djoko. "Kebijakan Makanan Bergizi Gratis : Tinjauan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (2025): 144–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dak.v12i1.18223>.